

**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dalam Mengentaskan Kemiskinan
Dengan Pendekatan *Fixed Effect Model*
(Studi Kasus di Kabupaten/Kota Provinsi Papua)**

Yahya Nusa

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambatan Bulan, Jl. Hasanuddin, Timika, 99910, Indonesia

Histori Artikel:

Pengajuan: 2 Januari 2024

Revisi: 23 Februari 2024

Diterima: 25 Maret 2024

Keywords:

Local Original Revenue,
Equalization Fund, Special
Autonomy Fund, Poverty,
FEM

Abstract

The purpose of this study is to analyze whether poverty alleviation in the districts/cities of Papua province can be influenced by Regional Original Income or still depends on central transfer funds. The data used in this study are Regional Original Revenue, Balancing Fund and Special Autonomy Fund obtained from the Budget Realization Report (LRA) at the Directorate General of Financial Balance (DJPK) of the Ministry of Finance. Meanwhile, poverty data is obtained from the Central Statistics Agency (BPS) of Papua province, where the data is a combination of time series data and cross section (pool data / panel data) in 29 districts/cities in Papua province during 2012-2022. The research method is panel data analysis with Fixed Effect Model (FEM) approach using EViews12. The results showed that Regional Original Income did not have a significant effect on poverty in the districts/cities of Papua province, while the Balancing Fund and Special Autonomy Fund had a significant effect on poverty in the districts/cities of Papua Province. This shows that in alleviating poverty in the districts/cities of Papua province still depends on central transfer funds, namely the balance fund and special autonomy funds. However, if the government can optimize the sources that are the basis of local original income optimally, then the role of local original income has the potential to reduce poverty in the districts/cities of Papua province.

Citation: Nusa, Y. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dalam Mengentaskan Kemiskinan Dengan Pendekatan Fixed Effect Model (Studi Kasus di Kabupaten Mimika/Kota Provinsi Papua). *Journal Of Financial and Tax*, 4(1), 60-79.

Abstrak

Tujuan penelitian ini menganalisis apakah dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten/Kota provinsi Papua dapat dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah atau masih tergantung pada dana transfer pusat. Data yang digunakan pada penelitian

ini yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana perimbangan dan Dana Otonomi Khusus yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan. Sedangkan data Kemiskinan diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Papua, dimana data tersebut gabungan antara data *time series* dan *cross section* (*pool data/data panel*) pada 29 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua selama tahun 2012-2022. Metode penelitian yaitu analisis data panel dengan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM) menggunakan EViews12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Papua sedangkan Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota provinsi Papua. Hal ini menunjukkan bahwa dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten/Kota provinsi Papua masih tergantung pada dana transfer pusat yaitu dana perimbangan dan dana otonomi khusus. Namun apabila pemerintah dapat mengoptimalkan sumber-sumber yang menjadi basis pendapatan asli daerah secara maksimal, maka peran pendapatan asli daerah berpotensi dalam menurunkan kemiskinan di Kabupaten/Kota provinsi Papua.

Kata Kunci:

PAD, Dana Perimbangan,
Dana Otonomi Khusus,
Kemiskinan, FEM.

JEL Classification: G30, I30, P36

Penulis Korespondensi:

Yahya Nusa
Yahya.nusa@gmail.com

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah merupakan situasi klasik di semua negara bahkan daerah dimana suatu rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi (Sendouw et al., 2019). Kemiskinan merupakan isu yang paling sentral yang dibicarakan diseluruh dunia lebih khusus bagi negara-negara berkembang diantaranya Indonesia. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam pengentasan kemiskinan demi untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan itulah tujuan akhir dari cita-cita suatu negara. Berbagai macam cara, konsep dan upaya tentang kemiskinan diolah dan dievaluasi dan diadaptasi diberbagai negara berkembang namun belum membuahkan hasil yang memuaskan karena masih banyak negara-negara berkembang yang masyarakatnya masih dalam lingkaran kemiskinan termasuk Indonesia. Kemiskinan bukan hanya di alami oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia, namun juga dialami oleh negara-negara lainnya seperti Cina.

Sesuai penelitian Fosu (2017) tingkat kemiskinan perkotaan dan pedesaan China pada tingkat \$1,25 masing-masing adalah 1,7 persen dan 26,1 persen, dan yang terakhir di atas median global sebesar 17,9 persen. Jadi, kemiskinan ekstrim pada dasarnya telah menjadi fenomena pedesaan di Cina. Sebaliknya, masing-masing sebesar 43,8 persen dan 36,2 persen, tingkat kemiskinan pedesaan dan perkotaan India jauh di atas median global. Dimana pertumbuhan PDB India yang kuat pada periode yang lebih baru mungkin tidak mengurangi kemiskinan dengan cara yang sama.

Dalam mengentaskan kemiskinan tentunya perlu campur tangan pemerintah dimana pemerintah perlu mengalokasikan dana dalam pengentasan kemiskinan baik dari pendapatan asli daerah maupun dana transfer dari pusat. PAD merupakan pendapatan asli daerah yang memiliki tujuan untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah dalam konsep otonomi keuangan daerah sehingga daerah tidak mengandalkan atau tergantung dari dana perimbangan (Banga, 2017). Dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 pasal 1 ayat 18 bahwa "PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Menurut Abdul Halim (2004) PAD adalah pendapatan yang diperoleh oleh suatu daerah dari sumber-sumber yang ada di daerah tersebut dan dipungut sesuai dengan ketentuan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk mengatur diri sendiri untuk kepentingan umum. Dengan melakukan ini, setiap daerah diharapkan dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan pendapatan daerah masing-masing sambil meningkatkan derajat kemandirian daerah dari pusat.. Dengan PAD yang tumbuh dengan tingkat yang positif, ada kemungkinan peningkatan pertumbuhan ekonomi, salah satunya adalah pengentasan kemiskinan (Kadafi & Murtala, 2020)

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hanif Nurcholis (2007)(2007), Budi Purnomo (2009), Gede et al. (2018), bahwa untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah masing-masing maka pemerintah daerah memperoleh pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah sesuai dengan potensi daerah itu sendiri sebagai perwujudan desentralisasi dan dalam

pengambilan kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat disetiap daerah dengan memanfaatkan PAD yang ada sehingga dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan dalam jangka panjang. Penelitian yang dilakukan oleh Manek & Badrudin (2017) Pendapatan yang berasal dari daerah mempunyai dampak negatif yang signifikan terhadap kemiskinan, demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Abrar et al. (2020), Rasu et al. (2019) bahwa PAD berpengaruh signifikan dalam mengurangi kemiskinan. Namun berbeda yang ditemukan oleh Kadafi & Murtala (2020) dan (Fikri et al. (2019) bahwa PAD tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan yang berarti semakin tinggi PAD belum mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Demikian pula penelitian Supardi & Syagitha, (2016) bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan yang berarti semakin tinggi pendapatan asli daerah maka kemiskinan semakin meningkat.

Selain PAD, dana transfer pusat ke daerah, atau dana perimbangan, adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang membantu kebutuhan daerah selama pelaksanaan desentralisasi. Diharapkan bahwa dana perimbangan akan memberi daerah kemandirian untuk mengelola keuangan mereka sendiri, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan (Paat et al., 2017). Secara umum, Dana Perimbangan dapat memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di daerah, terutama jika dana tersebut digunakan dengan tepat sasaran dan efektif serta diimbangi dengan kebijakan-kebijakan yang tepat untuk mengurangi kemiskinan, sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Wijaya et al. (2018), Jalil (2020), Paulus et al. (2019), Badrudin & Kuncorojati (2017) dan Kadafi & Murtala (2020) dimana Dana Perimbangan (DBH,DAU dan DAK) berpengaruh signifikan dalam menurunkan kemiskinan di daerah. Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Paulus et al. (2019), Balqis & Suriani (2021), Gumelar & Khairina (2021) bahwa Dana perimbangan dapat mengurangi tingkat kemiskinan secara signifikan. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Paat et al. (2017), Manek & Badrudin (2017) bahwa Dana perimbangan mempunyai dampak positif terhadap tingkat kemiskinan. Demikian halnya penelitian yang dilakukan oleh Panji & Indrajaya (2016) menemukan bahwa dana perimbangan mempunyai efek positif terhadap tingkat kemiskinan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2001, provinsi Papua diberi otonomi khusus oleh pemerintah pusat untuk mengurus pemerintahannya sendiri, setara dengan pemerintah daerah lainnya di Indonesia, termasuk dalam upaya mengurangi kemiskinan. Undang-undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menyatakan “bahwa Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua”. Berdasarkan Undang-Undang tersebut diatas provinsi Papua diberikan kewenangan dalam mengatur daerahnya sesuai peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) mengatur kewenangan Provinsi Papua, dan Peraturan Daerah Khusus (Perdapus) mengatur kewenangan kabupaten dan kota. Perdapus mencakup kewenangan dalam semua bidang pemerintahan, tidak termasuk politik internasional, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama, peradilan, dan kewenangan tertentu di bidang lain yang ditetapkan oleh perundang-undangan. Namun, Undang-Undang Nomor 2001 menempatkan orang asli Papua dan penduduk Papua secara keseluruhan sebagai subjek utama dalam pengelolaan pemerintah, baik pemeringkat provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, serta perangkat di bawahnya, dengan tujuan memberikan pelayanan terbaik dan pemberdayaan rakyat. Firmansyah et al., (2022) menjelaskan otonomi khusus sebagai wewenang khusus yang diberikan kepada masyarakat Papua oleh pemerintah untuk mengatur dan mengurus kebutuhan atau kepentingannya berdasarkan hak dan aspirasi masyarakat Papua. Kebijakan Otsus Papua memberikan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dan orang Papua secara keseluruhan kewenangan untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam NKRI. Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang ada di provinsi Papua juga mencakup kewenangan untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam di wilayah tersebut untuk kepentingan rakyat Papua, memberdayakan potensi ekonomi, sosial, dan budaya yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Ini juga melibatkan orang asli Papua secara signifikan dalam proses perumusan kebijakan daerah, termasuk menetapkan garis besar kebijakan yang akan diterapkan (Rochendi S & Kausar Ali Saleh, 2017).

Berdasarkan undang-undang No 21 diatas makan pemerintah pusat mengucurkan dana otonomi khusus yang diharapkan salah satunya untuk mengentaskan kemiskinan di provinsi papua. Dengan adanya dana ini, pemerintah daerah dapat lebih efektif dalam mengelola keuangan daerah dan mengalokasikan dana sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat membantu dalam mengurangi kemiskinan di daerah tersebut dengan cara memperbaiki pelayanan publik, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta mengembangkan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah sebagaimana penelitian yang telah dilakukan oleh Awom (2021) dan Fardan (2019), Muliadi & Amri (2019) dimana dana otonomi khusus berpengaruh langsung mengurangi tingkat kemiskinan. Berbeda dengan hasil penelitian seperti yang dilakukan oleh Kadafi & Murtala (2020), Alfiady & Dewi (2019) bahwa dana otonomi khusus tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, serta temuan dari Amar et al. (2023) yang menunjukkan bahwa dana otonomi khusus tidak mempengaruhi kemiskinan

Secara umum jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2022 turun sebesar 140,83 ribu jiwa atau sebesar 26,503,65 ribu jiwa jika dibandingkan tahun 2021 yang masih sebesar 26.363,27 ribu jiwa atau mencapai 9,57% pada tahun 2022 dibandingkan pada tahun 2021 yang masih sebesar 9,71% (BPS, 2022). Dikutip dari laman <https://fiskal.kemenkeu.go.id>, penurunan tingkat kemiskinan disebabkan oleh penurunan harga komoditas global, terutama harga makanan dan energi, yang berdampak pada harga domestik, meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Hal ini berbeda dengan provinsi papua dimana tingkat kemiskinan melebihi tingkat kemiskinan secara nasional dimana selama kurun waktu tahun 2012-2022 cenderung meningkat bahkan pada tahun 2019-2022 mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini disebabkan bahwa pembangunan yang dilakukan pemerintah terkadang belum sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Model pembangunan yang dilaksanakan pemerintah yang tidak berdasarkan kebutuhan masyarakat dapat mengakibatkan menurunnya kesejahteraan masyarakat (Gede et al., 2018), padahal provinsi papua adalah salah satu provinsi yang mendapatkan kekhususan dari pemerintah pusat dan setiap tahun mendapatkan kucuran dana otonomi khusus.

Berdasarkan data BPS 2022 bawa tingkat kemiskinan di provinsi papua dalam kurun waktu 11 tahun terakhir berkisar rata-rata 28,35% yang terpaut jauh dari rata-rata nasional

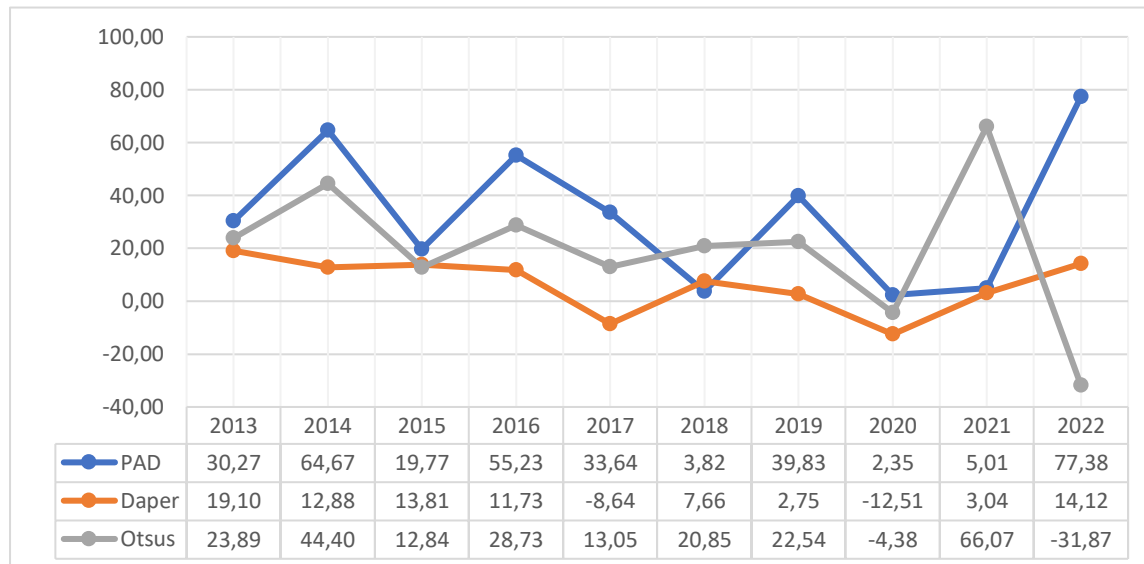
yang sebesar 10,41%. Di bawah ini data kemiskinan tingkat nasional dan provinsi Papua dalam kurun waktu 2012-2022

Tabel 1. Prosentase Penduduk Miskin di Indonesia dan Provinsi Papua Tahun 2012-2022

Tahun	Indonesia (%)	Prov. Papua (%)
2012	11,66	31,53
2013	11,47	30,66
2014	10,96	28,17
2015	11,13	28,40
2016	10,70	28,40
2017	10,26	27,76
2018	9,66	27,43
2019	9,22	26,55
2020	10,19	26,80
2021	9,71	27,38
2022	9,57	28,80
Rata-rata/Tahun	10,41	28,35

Sumber: BPS Provinsi Papua

Tingginya tingkat kemiskinan di provinsi Papua hingga saat ini menunjukkan bahwa Dana Otsus belum dilaksanakan secara optimal ini terlihat dimana persentase kemiskinan cenderung meningkat, hal ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah provinsi papua belum memberikan efek yang signifikan terhadap pengurangan kemiskinan. Jika melihat kucuran dana dari pusat baik dana perimbangan maupun dana otonomi khusus yang begitu besar seharusnya masyarakat papua lebih sejahtera dan terlepas dari belenggu kemiskinan. Dimana sesuai data DJPK kementerian keuangan bahwa dana perimbangan yang dikucurkan oleh pemerintah pusat ke kabupaten/kota dan provinsi papua dalam kurun waktu periode 2012-2022 rata-rata sebesar 29,28 triliun dan dana otonomi khusus rata-rata sebesar 6,84 triliun. Berikut pertumbuhan PAD, DP dan DOK dari tahun 2012-2022 di Kabupaten/Kota provinsi Papua.



Gambar 1: Pertumbuhan PAD, DP dan DOK dari tahun 2012-2022 di Kabupaten/Kota provinsi Papua. periode 2012-2022

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan RI

Sesuai grafik tersebut diatas bahwa persentase pertumbuhan penerimaan PAD, Dana perimbangan dan Dana otonomi khusus mengalami fluktuasi dari tahun 2012-2022. Dimana PAD selalu mengalami pertumbuhan yang signifikan rata-rata 33,20% dibandingkan dengan dana perimbangan mengalami pertumbuhan rata-rata 6,39% dan dana otonomi khusus rata-rata pertumbuhan 19,61%.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah provinsi Papua bergantung pada dana transfer pusat atau pendapatan asli daerah dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten/Kota provinsi Papua selama periode 2012-2022.

METODE

Berdasarkan tujuan penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah untuk menentukan hubungan kausalitas antara variabel bebas (eksogen) Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Dana Otonomi Khusus terhadap kemiskinan. Populasi adalah suatu wilayah atau area yang terdiri dari objek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti dan kemudian dipelajari dan disimpulkan (Sugiyono 2018). Dalam penelitian ini, realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, dan Kemiskinan adalah populasi. Sementara PAD, DP, dan DOK berasal dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, kemiskinan

berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Papua. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang menggunakan data rasio. Data yang digunakan untuk menganalisis pengaruh antar variabel yang diwakili dalam angka. Penelitian deskriptif adalah menggambarkan atau menganalisis keadaan yang sebenarnya dan sistematis tentang kebenaran dan keakuratan hasil penelitian (Sugiyono, 2018). Menurut Sanusi, (2011) dalam (Chandrarin, 2017) skala rasio adalah skala yang menunjukkan peringkat, jarak, dan perbandingan konstruk yang diukur. Penggunaan nilai absolut memperbaiki kelemahan skala interval yang menggunakan nilai relatif, yang menunjukkan perbedaan magnitudo dan proporsi (Chandrarin, 2017). Lokasi penelitian ini dilakukan di 29 Kabupaten/Kota provinsi Papua (*Cross section*) selama periode 2012-2022, sehingga banyaknya observasi sebanyak 319 data observasi. Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan model regresi berganda. Sedangkan alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan alat analisis eViews. Dana otonomi khusus, PAD, dan dana perimbangan digunakan sebagai variabel bebas dalam penelitian ini. PAD, PD dan DOK diukur dengan satuan rupiah, sedangkan kemiskinan diukur dengan satuan persentase.

Adapun persamaan statistik dalam penelitian ini adalah :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 \ln X_{1it} + \beta_2 \ln X_{2it} + \beta_3 \ln X_{3it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana :

Y = Kemiskinan

X_1 = Pendapatan Asli Daerah

X_2 = Dana Perimbangan

X_3 = Dana Otonomi Khusus

$\ln$ = Nilai Logaritma Natural

$\beta_0, \beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien Regresi

ε = Error Term

HASIL

Analisis Deskriptif

Analisis statistik memberikan gambaran tentang nilai dari standar deviasi, nilai minimum, nilai maksimum dan nilai mean dimana hal tersebut memberikan gambaran dari varians atau perilaku variabel Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus dan Kemiskinan. Adapun hasil analisis deskriptif sebagai berikut.

Tabel 2 Analisis Deskriptif

	PAD	DAPER	DOK	KM
Mean	23.77673	27.44717	25.72878	3.323361
Median	23.62776	27.45224	25.66755	3.432373
Maximum	28.10301	29.23600	27.48169	3.861151
Minimum	20.95920	26.67450	23.86592	2.305581
Std. Dev.	1.159474	0.300750	0.539976	0.402506
Observations	319	319	319	319

Sumber : Hasil Olahan *Eviews* 12

Berdasarkan tabel diatas bahwa semua variabel terdapat 319 data observasi dengan penjelasan bahwa variabel PAD memiliki nilai minimum 20.95920 dan nilai maksimum sebesar 28.10301 dan nilai mean sebesar 23.77673 lebih besar dari standar deviasi sebesar 1.159474. Hal ini menunjukkan bahwa variabel PAD bersifat homogen. Variabel DAPER memiliki nilai minimum 26.67450 dan nilai maksimum sebesar 29.23600 dan nilai mean sebesar 27.44717 lebih besar dari standar deviasi sebesar 0.300750. Hal ini menunjukkan bahwa variabel DAPER bersifat homogen. Variabel DOK memiliki nilai minimum 23.86592 dan nilai maksimum sebesar 2566755 dan nilai mean sebesar 25.72878 lebih besar dari standar deviasi sebesar 0.539976. Hal ini menunjukkan bahwa variabel DOK bersifat homogen. Variabel Kemiskinan memiliki nilai minimum 2.305581 dan nilai maksimum sebesar 3.861151 dan nilai mean sebesar 3.323361 lebih besar dari standar deviasi sebesar 0.402506. Hal ini menunjukkan bahwa variabel DAPER bersifat homogen.

Variabel PAD, DAPER, DOK dan Kemiskinan memiliki standar deviasi lebih kecil dari nilai mean, hal ini menunjukkan bahwa semua variabel bersifat homogen yang artinya bahwa seluruh data observasi memiliki varians atau karakteristik yang sama. Data yang memenuhi sifat homogen menunjukkan kehandalan data tersebut (Sanusi, 2016)

Teknik Pemilihan model

Penelitian ini menggunakan data panel, maka diperlukan pengujian secara ekonometrika. Data panel dimaksud adalah penggabungan antara data cross section dan time series sehingga perlu dilakukan pengujian model terbaik. Untuk menentukan model yang akan digunakan dalam analisis regresi data panel maka terdapat tiga model yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM). Dan untuk menentukan model terbaik yang cocok dengan penelitian ini maka dilakukan Uji Chow dimana jika nilai *Prob Cross-section chi-square* $< 0,05$ maka model yang terbaik *Fixed Effect Model* (FEM), Jika nilai *Prob Cross-section chi-square* $> 0,05$ maka model yang terbaik *Common Effect Model* (CEM), jika hasil uji chow yang terpilih FEM maka akan dilanjutkan dengan uji Hausman. Pada uji Hausman jika nilai *Prob Cross-section random* $< 0,05$ maka model yang terbaik *Fixed Effect Model* (FEM), jika nilai *Prob Cross-section random* $> 0,05$ maka model yang terbaik *Random Effect Model* (REM). Jika Uji Hausman terpilih FEM maka selesai pemilihan model dan model yang terbaik yaitu FEM, namun jika terpilih REM maka akan dilanjutkan dengan uji *Lagrange Multiplier* (uji LM). Pada uji LM jika nilai *Both Breusch-Pagan* $> 0,05$ maka model yang terbaik adalah CEM, dan sebaliknya jika nilai *Both Breusch-Pagan* $< 0,05$ maka model yang terbaik adalah REM.

Tabel 3. Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: MODEL_FEM			
Test cross-section fixed effects			
<i>Effects Test</i>	<i>Statistic</i>	<i>d.f.</i>	<i>Prob.</i>
Cross-section F	286.124564	(28,287)	0.0000
Cross-section Chi-square	1073.226491	28	0.0000

Sumber : Hasil Olahan *Eviews* 12

Berdasarkan uji chow diatas maka nilai *Cross-section Chi-square statistis* sebesar 1073.226491 dengan nilai Prob. sebesar 0,00 dimana nilai tersebut $< 0,05$. Hal ini berarti hasil Uji Chow model terbaik yaitu FEM, sehingga dapat dilanjutkan dengan Uji Hausman.

Tabel 4. Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: MODEL_REM			
Test cross-section fixed effects			
<i>Test Summary</i>	<i>Chi-Sq. Statistic</i>	<i>Chi-Sq. d.f.</i>	<i>Prob.</i>
Cross-section random	26.048361	3	0.0000

Sumber : Hasil Olahan *Eviews 12*

Berdasarkan uji Hausman diatas nilai *Cross-section Random Chi Square Statistic* sebesar 26.048361 dengan nilai Prob. sebesar 0,000 dimana nilai tersebut $<0,05$ yang berarti bahwa hasil Uji Hausman yang terbaik yaitu FEM, sehingga tidak dilanjutkan pada uji LM. Dengan demikian pada penelitian ini menggunakan model yang terbaik yaitu *Fixed Effect Model* (FEM).

Uji Asumsi klasik

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menentukan apakah model regresi menunjukkan korelasi yang tinggi atau sempurna antara variabel independen (Ghozali, 2018). Pengujian multikolenioritas akan menggunakan Variance Inflation Factor (VIF). VIF menunjukkan apakah setiap variabel eksogen dalam pengujian hipotesis diwakili oleh variabel eksogen lainnya. Nilai VIF di bawah 10 atau nilai toleransi di atas 0,10 menunjukkan tidak adanya multikolinieritas. Sebaliknya, nilai VIF di atas 10 atau nilai toleransi di atas 0,10 menunjukkan adanya multikolinieritas.

Tabel 5: Uji Multikolinnieritas

Variance Inflation Factors			
Included observations: 319			
<i>Variable</i>	<i>Coefficient Variance</i>	<i>Uncentered VIF</i>	<i>Centered VIF</i>
C	3.219976	10954.32	NA
PAD	0.000384	739.9006	1.749844
Dana Perimbangan	0.006868	17603.23	2.106647
Dana Otonomi Khusus	0.001296	2921.007	1.282001

Sumber : Hasil Olahan *Eviews 12*

Berdasarkan uji multikolinieritas dengan Variance Inflation Factors diatas diketahui bahwa variabel Pendapatan Daerah memiliki nilai VIF sebesar 1,7498 <10, variabel Dana Perimbangan memiliki nilai VIF sebesar 2,1066<10 dan variabel Dana Otonomi Khusus memiliki nilai VIF 1,2820 <1 0, hal ini berarti ketiga variabel independen tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Menurut Gozali (2018). uji heteroskedastisitas digunakan untuk menentukan apakah ada ketidaksamaan dalam model regresi antara residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Uji Glejser digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan apakah ada gejala heteroskedastisitas. Tidak ada masalah heteroskedastisitas jika nilai Prob lebih besar dari 0,05.

Tabel 6: Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Uji Glejser				
<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
PAD	1.080249	1.296459	0.833231	0.4054
Dana Perimbangan	-4.209419	5.610731	-0.750244	0.4537
Dana Otonomi Khusus	1.604118	1.744233	0.919669	0.3585

Sumber : Hasil Olahan *Eviews 12*

Variabel Pendapatan Asli Daerah diketahui berdasarkan uji heteroskedastisitas dengan Uji Glejser nilai Prob. 0,4054>0,05, variabel dana perimbangan nilai Prob 0,4537>0,05 dan variabel Dana Otonomi Khusus nilai Prob. 0,3585. Hal ini berarti tidak terdapat masalah Heteroskedastisitas dimana nilai seluruh variabel independen lebih besar dari 0,05.

Estimasi Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil pemilihan model tersebut diatas maka model yang tepat yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model* (FEM)

Tabel 7: Fixed Effect Model (FEM)

Dependent Variable: Kemiskinan				
Method: Panel Least Squares				
Sample: 2012 2022				
Periods included: 11				
Cross-sections included: 29				
Total panel (balanced) observations: 319				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	9.310581	0.543610	17.12733	0.0000
X1	-0.007750	0.007524	-1.030046	0.3039
X2	-0.180096	0.025214	-7.142795	0.0000
X3	-0.033419	0.008515	-3.924442	0.0001
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
Root MSE	0.056589	R-squared		0.980172
Mean dependent var	3.323361	Adjusted R-squared		0.978030
S.D. dependent var	0.402506	S.E. of regression		0.059660
Akaike info criterion	-2.705385	Sum squared resid		1.021531
Schwarz criterion	-2.327685	Log likelihood		463.5089
Hannan-Quinn criter.	-2.554546	F-statistic		457.6611
Durbin-Watson stat	1.245457	Prob(F-statistic)		0.000000

Sumber : Hasil Olahan *Eviews* 12

Berdasarkan tabel diatas maka persamaan statistik dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$\text{Kemiskinan} = 9.3106 - 0.0078\text{PAD} - 0.1801\text{DP} - 0.0334\text{DOK}$$

Persamaan di atas menunjukkan bahwa konstanta penelitian ini sebesar 9,3106, yang berarti bahwa kemiskinan akan tetap konstan sebesar 9,3106 jika PAD, Dana Perimbangan, dan Dana Otonomi Khusus bernilai 0. Selanjutnya, PAD berdampak pada kemiskinan, dengan koefisien regresi -0,0078 dan signifikansi 0,3039. Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa, ketika PAD meningkat sebesar 1%, kemiskinan akan menurun sebesar 0,0078, tetapi tidak signifikan. Ini menunjukkan bahwa PAD memiliki dampak negatif terhadap kemiskinan, tetapi tidak signifikan. Dana Perimbangan mempengaruhi kemiskinan dengan nilai koefisien -0,1801 dan nilai signifikansi 0,0000. Nilai ini menunjukkan bahwa ketika dana perimbangan naik sebesar 1%, kemiskinan akan turun secara signifikan sebesar 0,1801. Oleh karena itu, Dana Perimbangan berdampak negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Papua. Dana Otonomi Khusus juga berdampak terhadap kemiskinan dengan nilai koefisien -0,0334 dan nilai signifikansi 0,0001. Nilai ini menunjukkan bahwa ketika dana otonomi khusus meningkat sebesar 1%, kemiskinan akan

menurun secara signifikan sebesar 0,0334. Oleh karena itu, dana otonomi khusus berdampak negatif dan signifikan pada tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Papua.

Koefisien determinasi sebesar 457,66 dengan probabilitas F-statistik sebesar 0,000 menunjukkan bahwa PAD, Dana Perimbangan, dan DOK dapat menurunkan variasi kemiskinan di kabupaten/kota provinsi Papua sebesar 97,80 persen dan variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini dapat menurunkan variasi kemiskinan sebesar 2,20%.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan untuk menurunkan kemiskinan di kabupaten/kota provinsi Papua. walaupun pertumbuhan PAD mengalami pertumbuhan rata-rata 33,2% namun belum mampu mengatasi kemiskinan di kabupaten/kota provinsi Papua, itu artinya PAD tidak bisa diandalkan dalam mengentaskan kemiskinan di kabupaten/kota provinsi Papua. Hal ini sesuai penelitian yang dilakukan oleh Kadafi & Murtala (2020) menemukan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Namun jika melihat hasil analisis dimana PAD berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, maka apabila pemerintah daerah kabupaten/kota provinsi Papua dapat mengoptimalkan sumber-sumber yang menjadi basis PAD maka dalam jangka panjang peran PAD dapat menurunkan tingkat kemiskinan.

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh signifikan dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten/Kota provinsi Papua. Walaupun rata-rata pertumbuhan penerimaan dana perimbangan dalam periode 2012-2022 di kabupaten/kota provinsi Papua yang hanya tumbuh rata-rata sebesar 6,38% namun hal ini sangat berpengaruh signifikan untuk mengentaskan kemiskinan di provinsi Papua. Hal ini berarti semakin tinggi Dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat ke Kabupaten/Kota provinsi Papua maka semakin cepat kemiskinan di turunkan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Paulus et al. (2019) (Paulus et al., 2019),

Balqis & Suriani (2021), Gumelar & Khairina (2021) bahwa Dana Transfer Pusat ke Daerah mengurangi tingkat kemiskinan secara signifikan.

Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Wijaya et al. (2018), Jalil (2020), Paulus et al. (2019), Badrudin & Kuncorojati (2017) dan Kadafi & Murtala (2020) dimana Dana Perimbangan (DBH,DAU dan DAK) berpengaruh signifikan dalam menurunkan kemiskinan di daerah. (Muhammad Abrar et al., 2020) DAK dan DAU mampu menunjukkan pengaruh yang lebih signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah daerah dalam penggunaan dana perimbangan sudah dilaksanakan sesuai peruntukannya yaitu salah satunya menurunkan tingkat kemiskinan.

Pengaruh Dana Otonomi Khusus terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Dana otonomi khusus secara signifikan dapat menurunkan kemiskinan di Kabupaten/Kota provinsi Papua. Sesuai data penerimaan dana otonomi khusus di Kabupaten/Kota provinsi Papua dalam periode 2012-2022 rata-rata pertumbuhannya sebesar 19,61%. Hal ini berarti semakin tinggi dana otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat ke provinsi papua makin tingkat kemiskinan semakin berkurang. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh oleh Fardan (2019), Awom (2021), Muliadi & Amri (2019) bahwa Dana Otonomi Khusus berhubungan negatif terhadap kemiskinan Pada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Papua. Sesuai dengan amanat UU OTSUS No. 21 tahun 2001 bahwa dana otonomi khusus salah satu tujuannya yaitu untuk kesejahteraan rakyat papua maka dalam penelitian ini dapat dibuktikan bahwa dana otonomi khusus mampu menurunkan tingkat kemiskinan di kabupaten/kota provinsi Papua.

SIMPULAN

Temuan yang dapat disimpulkan dari penelitian ini yaitu adanya pengaruh yang signifikan dana perimbangan dan dana otonomi khusus dalam mengentaskan kemiskinan. Hal ini menunjukan ada dampak positif dari kucuran dana transfer pusat ke provinsi Papua dimana dana perimbangan dan dana otonomi khusus dapat dikelola dengan baik sehingga berdampak pada pengurangan kemiskinan di provinsi Papua. Sedangkan Pendapatan Asli

Daerah sesuai temuan dalam penelitian ini sama sekali tidak berpengaruh signifikan dalam mengentaskan kemiskinan di provinsi Papua hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten/kota di provinsi Papua belum memaksimalkan potensi sumber daya alam yang ada dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan demikian bahwa dalam mengentaskan kemiskinan di kabupaten/kota di provinsi Papua masih tergantung pada dana transfer pusat ke daerah.

SARAN

Hasil penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota di provinsi Papua dalam pengambilan kebijakan agar dalam mengentaskan kemiskinan di provinsi Papua dapat terwujud sesuai amanat undang-undang otonomi khusus. Pertama, dalam pengelolaan dana transfer pusat ke daerah yaitu dana perimbangan dan dana otonomi khusus yang dikucurkan pemerintah pusat ke pemerintah provinsi Papua lebih dimaksimalkan dan di manfaatkan sebaik mungkin sesuai tujuan dan peruntukannya sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang agar apa yang menjadi cita-cita bangsa dalam mengentaskan kemiskinan dapat terlaksana sesuai yang diharapkan. Kedua, bahwa provinsi Papua adalah daerah yang memiliki kekayaan atau sumber daya alam yang berlimpah maka diharapkan pemerintah kabupaten/kota di provinsi Papua dapat menggali dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada dalam meningkatkan pendapatan asli daerah agar kedepan provinsi Papua tidak tergantung pada dana transfer pusat ke daerah dalam mengentaskan kemiskinan sehingga provinsi Papua benar-benar dapat mandiri dalamx`x` membiayai kebutuhan dalam menjalankan roda pemerintahan yang berdampak kepada masyarakat khususnya dalam pengentasan kemiskinan dan pada akhirnya provinsi Papua bisa sejajar dengan provinsi lain yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat, Jakarta.
- Alfiady, T., & Dewi, R. (2019). Otonomi Khusus dan Kemiskinan di Aceh: Gambaran Kemiskinan Pelaku Usaha Batu Bata di Desa Ulee Pulo Kecamatan Dewantara

Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Jurnalisme*, 9(1), 38–60.
<https://ojs.unimal.ac.id/jurnalisme/article/view/3098>

Amar, T. K., Zulkifli, Z., & Gunawan, E. (2023). Pengaruh Dana Otonomi Khusus Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (JIM EKP) Fakultas*, 8(1), 68–77. <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/706/363>

Awom, S. B. (2021). Karakteristik Kemiskinan Di Provinsi Papua Barat Setelah Otonomi Khusus. *Journal Of Fiscal and Regional Economy Studies*, 4(2), 27–34.
<http://jfres.unipa.ac.id/index.php/jfres/index>

Badrudin, R., & Kuncorojati, I. (2017). The Effect of District Own-Source Revenue and Balance Funds on Public Welfare By Capital Expenditure and Economic Growth As an Intervening Variable in Special District of Yogyakarta. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 19(1), 54–59. <https://doi.org/10.9744/jmk.19.1.54-59>

Balqis, R., & Suriani. (2021). Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh. (CEBI) *Conference on Economic and Business Innovation*, 1(1), 1–12.
<https://doi.org/10.1111/j.1467-8519.1991.tb00149.x>

Banga, W. (2017). *Adminstrasi Keuangan Negara dan Daerah* (Ed.Pertama). Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor.

Budi Purnomo. (2009). *Obligasi Daerah*. Alfabeta, Bandung.

Fardan, M. F. (2019). *Pengaruh Dana Otonomi Khusus, Pendidikan, Dan Pendapatan Per Kapita Terhadap Kemiskinan (Studi Kasus: Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Periode Tahun 2011-2017)*. BS thesis. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Uin Jakarta

Fikri, K., Sudrajat, U., & Remofa, Y. (2019). Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Kabupaten Indragiri Hulu. *Manajemen Dan Bisnis*, 8(2), 257–269. <https://doi.org/10.34006/jmbi.v8i2.111>

Firmansyah, F., Mukhtar, S., Dianta, K., & Sebayang, A. (2022). The Effect Of Special Autonomy Funds , Regional Original Revenue And Local Government Expenditure On Welfare In Papua Province. *International Journal of Economy, Education and Entrepreneurship*, 2(3), 601–609. <https://doi.org/https://doi.org/10.53067/ije3.v2i3>

Fosu, A. K. (2017). Growth, Inequality, And Poverty Reduction In Developing Countries: Recent Global Evidence. *Research in Economics*, 71(2), 306–336.
<https://doi.org/10.1016/j.rie.2016.05.005>

Gede, I. P., Sugion, F., Bagus, I., & Purbadharmaja, P. (2018). Pengaruh PAD Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemiskinan Dan IPM Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 10(1), 361–388.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/view/65188>

- Ghozali, I. & D. R. (2018). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika EViews10* (Edisi 2). Badan Penerbit-UNDIP, Semarang.
- Gumelar, A., & Khairina, N. (2021). Analisis Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus: Kabupaten/Kota Di Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019). *Jurnal Ekonomi-Qu*, 11(2), 342-364. <http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/Ekonomi-Qu>
- Hanif Nurcholis. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Grasindo, Jakarta.
- Jalil, S. & A. (2020). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Aceh Tengah. *Gajah Putih Journal of Economics Review (GPJER)*, 2(1), 1-15. <https://jurnal.ugp.ac.id/index.php/gpjer>
- Kadafi, M., & Murtala, M. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Aceh Periode 2010-2017. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 3(2), 23-31. <https://doi.org/10.29103/jeru.v3i2.3203>
- Manek, M., & Badrudin, R. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Telaah Bisnis*, 17(2), 81-98. <https://doi.org/10.35917/tb.v17i2.49>
- Muhammad Abrar, Bambang Juanda, Muhammad Firdaus, & Dedi Budiman Hakim. (2020). The Impact of Special Autonomy Funds on Poverty of Human Development and Unemployment in Aceh. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 12(10), 2020. www.ijicc.net
- Muliadi, M., & Amri, K. (2019). Penerimaan Zakat dan Penurunan Kemiskinan di Aceh: Peran Dana Otonomi Khusus Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI)*, 5(3), 231-244. <https://doi.org/10.29040/jiei.v5i3.706>
- Paat, D. C., Koleangan, R. A. M., & Rumat, V. A. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Kota Bitung. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 18(4), 1-10. <https://doi.org/10.35794/jpekd.15774.19.1.2017>
- Panji, I. P. B., & Indrajaya, I. G. B. (2016). Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Unud*, 5(3), 316-337. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/view/17579/12972>
- Paulus, D. I. S., Koleangan, R. A. M., & Engka, D. S. M. (2019). Analisis Pengaruh Pad, Dau Dan Dak Terhadap Kemiskinan Melalui Belanja Daerah Di Kota Bitung. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(2), 1-18. <https://doi.org/10.35794/jpekd.15781.19.2.2017>
- Rasu, K. J. ., Kumenaung, A. G., & Koleangan, R. A. . (2019). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Terhadap

Tingkat Kemiskinan di Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 20(2), 1. <https://doi.org/10.35794/jpekd.23843.20.2.2019>

Rochendi S, & Kausar Ali Saleh. (2017). Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Barat. *Jurnal Politik: Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan*, 13(1), 1903–1919. <https://www.neliti.com/id/publications/126072/hubungan-pemerintah-pusat-dan-daerah-dalam-otonomi-khusus-di-provinsi-papua-bara>

Sanusi, W. (2016). Analisis Homogenitas Data Curah Hujan Tahunan Kota Makassar. *Scientific Pinisi*, 2(2), 137–142. <https://ojs.unm.ac.id/pinisi/article/view/2438>

Supardi, S., & Syagitha, M. F. (2016). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Tahun 2006-2014)* [Universitas Islam Indonesia Yogyakarta]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/4031>

Wijaya, D. N., Arifin, Z., & Hadi, S. (2018). Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2016. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(1), 156–166. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jie/article/view/6975>